



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 954/Kep. 194-DPKAD/2012

TENTANG

PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG SELAKU KOORDINATOR
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG SELAKU PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH DAN BENDAHARA UMUM DAERAH, SERTA PEJABAT
PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG
SELAKU KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2012

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Penunjukan Sekretaris Daerah Kota Bandung
Selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah,
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Bandung Selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah dan Bendahara Umum Daerah, serta Kepala
Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Selaku
Kuasa Bendahara Umum Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012,
telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung
Nomor 954/Kep.002-DPKAD/2012, namun dalam
perkembangannya terdapat pejabat yang berhalangan,
sehingga perlu dilakukan perubahan untuk kemudian
ditetapkan kembali;

b. bahwa ...

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Kota Bandung Selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah, serta Pejabat pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan ...

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Sekretaris Daerah Kota Bandung Selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah, serta Pejabat pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012.
- KEDUA : Susunan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut:
1. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah:
 - a) Membantu Walikota menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah;
 - b) Mempunyai tugas koordinasi di bidang:
 - 1) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 2) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang Daerah;
 - 3) penyusunan ...

- 3) penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 4) penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 5) penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 6) tugas-tugas pejabat perencanaan daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
 - 7) penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- c) Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Sekretaris Daerah mempunyai tugas:
- 1) memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 - 2) menyiapkan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 3) menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
 - 4) memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 - 5) melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota Bandung.
- d) Bertanggungjawab ...

d) Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, kepada Walikota Bandung.

2. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab:

a) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab:

- 1) menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah;
- 2) menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 3) melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- 4) melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- 5) menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 6) melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota Bandung;
- 7) bertanggungjawab dan melaporkan atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

b) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab:

- 1) menyusun Kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- 2) mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;

3) melakukan ...

- 3) melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 4) memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas Daerah;
 - 5) menetapkan SPD;
 - 6) melaksanakan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah;
 - 7) menyajikan informasi keuangan Daerah;
 - 8) melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik Daerah;
 - 9) melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Walikota Bandung;
 - 10) bertanggungjawab dan melaporkan atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
3. Kepala Seksi Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab melaksanakan penatausahaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mencakup:
- a) menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - b) memantau Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - c) melakukan Pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah;
 - d) bertanggungjawab dan melaporkan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bendahara Umum Daerah.

4. Kepala ...

4. Kepala Bidang Pemberdayaan Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab melaksanakan penatausahaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mencakup:
- a) menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan Daerah;
 - b) melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik Daerah;
 - c) bertanggungjawab dan melaporkan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bendahara Umum Daerah.

KEEMPAT : Dalam hal Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 3 (tiga) berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.002-DPKAD/2012 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah, serta Kepala Bidang pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Maret 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG SELAKU KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN BENDAHARA UMUM DAERAH, SERTA PEJABAT PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG SELAKU KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2012

No	Nama/NIP/Pangkat/Golongan/ Jabatan SKPD	Spesimen		Jabatan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
		Tanda Tangan	Paraf	
1	2	3	4	5
1.	Dr. H. Edi Siswadi, M.Si. NIP. 19631221 198503 1 007 Pembina Utama Madya (IV/d) Sekretaris Daerah Kota Bandung.			Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.
2.	Drs. H. Dadang Supriatna, MH. NIP. 19610308 199103 1 009 Pembina TK I (IV/b). Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.			Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah.
3.	Deni Kusnadi, SIP NIP. 19651216 199503 1 003 Kepala Seksi Belanja Tidak Langsung pada Bidang Perbendaharaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.			Kuasa Bendahara Umum Daerah sesuai Diktum KETIGA angka 3.
4.	Drs. Agus Slamet Firdaus, M.Si. NIP. 19670114 198708 1 001 Pembina (IV/a). Kepala Bidang Pemberdayaan Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.			Kuasa Bendahara Umum Daerah sesuai Diktum KETIGA angka 4.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007